

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SETDA PROVINSI JAMBI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai Akuntabilitas mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dan memberikan informasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab XII pasal 294 ayat ayat (1) PPK - SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 semester II telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan dari Biro – Biro yang berada di bawah Sekretariat Daerah.

Laporan Keuangan disajikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Transparansi

Memberikan informasi Keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan

3. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat. Unsur Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca.
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah , antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan Keuangan setidak – tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan/Negara dan badan lainnya.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
4. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah..
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang tata cara Penatausahaan & Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah disajikan dengan berpedoman pada Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD akhir semester atau akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara belanja dan realisasi dalam periode berkenaan. Laporan Realisasi terdiri dari belanja beserta realisasinya yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 tanggal 31 Desember 2014 tentang penjabaran pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2015.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir tahun periode mengenai Asset (kekayaan), Hutang (kewajiban), dan ekuitas dari suatu entitas (untuk semester maupun pada akhir tahun anggaran per 31 Desember). Unsur-unsur yang mencakup dalam Neraca terdiri atas : Aset, Kewajiban , dan Ekuitas

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut ;

- a. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. **Kewajiban** adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam operasional terdiri dari : Pendapatan-LO, beban , transfer, dan pos-pos luar biasa (diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Disamping itu juga mencakup informasi mengenai posisi Aset ,jumlah asset serta penambahan maupun pengurangan aset. Catatan atas laporan keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan secara rinci.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS,
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan makro anggaran Sekretariat Daerah adalah Sasaran, Indikator dan Program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM) Provinsi Jambi serta Renstra dan Renja Per Biro yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Salah satu instrument untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan dan perubahan dapat disikapi dengan arif dan bijak. Perencanaan strategis Sekretariat Daerah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disepakati antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor

- 59 Tahun 2007 dan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ke pemerintahannya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari delapan Biro yang masing-masing melaksanakan Program dan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator pencapaian target kinerja keuangan semester dua Tahun 2017 jika ditinjau dari prosentasi realisasi hampir semua terealisasi sesuai yang direncanakan pada setiap masing-masing biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Penjelasan atau ikhtisar terhadap pencapaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari pencapaian kinerja dari delapan Biro yang dipimpin masing-masing oleh Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Oleh sebab itu penjelasan atau ikhtisar capaian kinerja keuangan ini terkait pada bab II yakni Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan. Selanjutnya penjelasan atas pencapaian kinerja keuangan dalam laporan ini diujikan dalam bentuk Belanja. Khusus Bagian Belanja akan dibagi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dalam capaian target kinerja keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENJA/RKPD pada tiap - tiap Biro. Capaian Kinerja Keuangan per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 138.785.709.225,00 atau sebesar 92,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 150.188.931.531,00 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti dalam realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Sekretariat Daerah Semester dua Tahun Anggaran 2018. Pada Semester dua ini hampir semua prosentasi serapan dana yang terdapat pada setiap biro-biro sudah terealisasi sehingga terciptanya efisiensi anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran /pengguna barang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, oleh karena itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada entitas pelaporan dalam hal ini adalah Gubernur Jambi. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelola keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Keuangan berupa :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca.
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang terendah sampai dengan unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Semester II Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan penggabungan data dari seluruh biro-biro yang ada pada Sekretariat Daerah yang disajikan dengan basis akrual sesuai Permendagri Nomor 64 Thn 2013. Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Laporan Realisasi APBD Setda merupakan jumlah pengeluaran berupa belanja dari masing-masing Biro lingkup Setda.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir tahun periode mengenai Asset (kekayaan), Hutang (kewajiban), dan ekuitas dari suatu entitas (untuk semester maupun pada akhir tahun anggaran per 31 Desember).

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam operasional terdiri dari : Pendapatan-LO, beban , transfer, dan pos-pos luar biasa (diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data Barang Milik Daerah yang disajikan dalam neraca diproses melalui pencatatan, inventarisasi, dan konsolidasi kepada Penyimpan dan Pengurus barang .

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual untuk pengakuan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. pengakuan asset , kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. **Basis Akrual adalah** basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pada Pemda .

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Sekretariat Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan kebijakan akuntansi tentang penyajian Laporan Keuangan Basis Akrual, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2010. Tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Sehingga seluruh aset tetap lingkup setda telah dilakukan penyusutan – penyusutan sesuai Tahun dan masa manfaat , dari hasil penyusutan tersebut sebagai dasar penentuan besarnya aset tetap yang ada dalam neraca.

Beberapa teori dibawah ini sebagai acuan dan wawasan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diakui jika telah disahkan oleh yang berwenang.

2. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi penyerahan atau penggantian kas dari :

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan dan Investasi jangka pendek.

- Kas

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian aset lancar.

- Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai dengan cara :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, maka dibayar dimuka merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Biaya dibayar di muka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun meliputi : Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan, jaringan dan instalasi serta Konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap dilaporkan pada neraca Sekretariat Daerah per 30 Juni dan per 31 Desember pada tahun berkenaan, berdasarkan nilai penyusutan yang telah diadakan dilaksanakan oleh penyimpan dan pengurus barang pada masing-masing biro dan di koordinasikan dengan Pengelolaan Aset dalam hal ini Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai penyusutan dihitung sesuai masa manfaat.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan penjualan angsuran, Tagihan tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga, Aset tak berwujud.

- Tagihan piutang penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

- Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi : Software Komputer, Lisensi, Hak Cipta (copyright), Hak Paten, Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan Kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet

Pemerintah Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

3. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga interasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi : utang transfer, Pemerintah, bunga pinjaman, utang jangka pendek, utang perhitungan fihak ketiga, bagian Lancar, Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

4. Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Daerah, terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara jumlah total nilai kewajiban dengan jangka pendek .

b. Ekuitas dana Investasi

Merupakan selisih antara jumlah total nilai investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan jumlah total nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Merupakan akumulasi dana yang yang disisihkan dalam dana cadangan guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Laporan Keuangan Setda Provinsi Jambi T.A 2018

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Umum

Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.799.500,00 atau 101,56 % dari jumlah yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.330.000.000,00 yg merupakan Pendapatan Retribusi Daerah. Dan Realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 138.485.709.225,00 atau 92,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.188.931.531,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1. Gambaran Umum PAD Dan Belanja Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
- Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 1.330.000.000,00	Rp. 1.350.799.500,00	70,49%
Belanja Operasi:	Rp. 140.024.649.160,00	Rp. 129.516.614.325,00	92,50%
- Belanja Pegawai	Rp. 59.446.534.131,00	Rp. 53.762.053.820,00	90,44%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 80.578.115.029,00	Rp. 75.754.560.505,00	94,01 %
Belanja Modal:	Rp. 10.164.282.371,00	Rp. 8.969.094.900,00	88,24%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 6.426.518.790,00	Rp. 5.243.372.100,00	81,59%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 3.712.763.581,00	Rp. 3.700.722.800,00	99,68%
- Belanja Modal Asset tetap lainnya	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	100 %
TOTAL	Rp 148.858.931.531,00	Rp. 137.134.909.725,00	92,12 %

5.1.2. Penjelasan Per Pos LRA

5.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekretariat Daerah Provinsi

Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 1.350.799.500,00 atau 101,56% dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.330.000.000,00,- terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah yang berasal dari Sewa Tanah, Sewa Gedung dan Perjanjian Kerjasama serta nilai Piutang (TANAH) yaitu pembayaran sewa yang merupakan Pendapatan Tahun sebelumnya sebesar Rp. 916.348.500,00,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2. Laporan Realisasi Penerimaan PAD Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018

No.	Rek	Jenis Retribusi	Anggaran	Realisasi	(%)
1	4.1.2.02.01	Sewa Tenda Pemda	Rp. 750.000.000,-	Rp. 399.649.500,-	53,29%
2	4.1.2.02.01	Sewa Rumah Milik Pemda	Rp. 250.000.000,-	Rp. 147.595.000,-	59,04%
3	4.1.2.02.01	Sewa Kantin/ Lahan	Rp. 18.500.000,-	Rp. 13.500.000,-	72,97%
4	4.1.2.02.01	Sewa Gedung ATM	Rp. 55.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	54,55%
5	4.1.2.02.01	Sewa Lahan Parkir WTC	Rp. 60.000.000,-	Rp. 36.000.000,-	60,00%
6	4.1.2.02.01	Sewa Gedung BKOW	Rp. 26.000.000,-	Rp. 38.000.000,-	146,15%
7	4.1.2.02.01	Sewa Tempat Lahan (Lapangan Depan Kantor Gubernur)	Rp. 20.500.000,-	Rp. 16.000.000,-	78,05%
8	4.1.2.02.01	Sewa Balai Lembaga Adat	Rp. 150.000.000,-	Rp. 171.500.000,-	114,33%
		Jumlah	Rp. 1.330.000.000,-	Rp. 852.244.500,-	64,08%
1	4.1.2.02.01	Pembayaran Sewa yang merupakan Pendapatan Tahun sebelumnya (PIUTANG)	-	Rp. 498.555.000,-	-
		Jumlah	Rp. 1.330.000.000,-	Rp.1.350.799.500,-	101,56%

5.1.2.2. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 129.516.614.325,00 atau 92,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.140.024.649.160,00 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

5.1.2.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 adalah Rp. 53.762.053.820,00 atau 90,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 59.446.534.131,00 dengan perincian sebagai berikut ini :

Tabel 5.3. Belanja Tidak Langsung Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
5.1.1.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representatif	Rp.27.193.078.872,00	Rp.25.253.357.650,00	92,95%
5.1.1.02	Tunjangan Keluarga	Rp. 2.626.536.908,00	Rp. 2.518.906.052,00	95,90%
5.1.1.03	Tunjangan Jabatan	Rp. 2.011.119.500,00	Rp. 1.565.220.000,00	77,83%
5.1.1.04	Tunjangan Fungsional	Rp. 51.588.375,00	Rp. 13.425.000,00	26,02%
5.1.1.05	Tunjangan Umum	Rp. 1.144.627.750,00	Rp. 1.094.830.000,00	95,65%
5.1.1.06	Tunjangan Beras	Rp. 2.051.039.064,00	Rp. 1.417.331.820,00	69,10%
5.1.1.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. 260.339.255,00	Rp. 28.175.309,00	10,82%
5.1.1.08	Pembulatan Gaji	Rp. 435.234,00	Rp. 366.519,00	84,21%
5.1.1.09	Iuran Asuransi Kesehatan	Rp. 807.326.379,00	Rp. 713.817.822,00	88,42%
5.1.1.10	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 58.763.533,00	Rp. 51.929.815,00	88,37%
5.1.1.11	Belanja Jaminan Kematian	Rp. 192.471.786,00	Rp. 185.875.451,00	96,57%
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp.23.049.209.575,00	Rp.20.896.818.382,00	90,66%
	Jumlah	Rp.59.446.534.131,00	Rp.53.762.053.820,00	90,44%

5.1.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 adalah Rp.75.754.552.505,00 atau 94,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.80.578.045.029,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4. Belanja Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 8.233.009.900,00	Rp. 7.329.883.662,00	89,03%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.72.345.035.129,00	Rp.68.424.668.843,00	94,59%
	Jumlah	Rp.80.578.045.029,00	Rp.75.754.552.505,00	94,02%

5.1.2.1.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Langsung Pegawai Setda Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 7.329.883.662,00 atau 89,03% dari yang dianggarkan Rp. 8.233.009.900,00 yang terdiri dari belanja Pegawai pada biro-biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi :

Tabel 5.5. Belanja Pegawai Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018

Nama Biro	Anggaran	Realisasi	%
Pemerintahan	Rp. 766.580.000,00	Rp. 63.776.000,00	94,68%
Hukum	Rp . 124.118.000,00	Rp . 117.372.500,00	94,57%
Humas dan Protokol	Rp . 107.748.000,00	Rp . 107.748.000,00	100%
Pembangunan dan Kerjasama	Rp . 206.052.000,00	Rp . 206.052.000,00	100%
Perekonomian dan SDA	Rp . 83.508.000,00	Rp . 77.202.000,00	92,45%
KESRAMAS	Rp . 2.019.571.500,00	Rp . 1.919.284.212,00	95,40%
Organisasi	Rp. 581.927.900,00	Rp . 84.200.000,00	14,47%
Umum	Rp. 4.524.495.000,00	Rp. 4.259.061.950,00	94,14%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp . 518.233.500,00	Rp . 495.187.000,00	95,56%
Total	Rp. 8.233.009.900,00	Rp. 7.329.883.662,00	89,03%

5.1.2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 68.424.668.843,00 atau 94,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.72.345.035.129,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Biro-biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yaitu :

Tabel 5.6. Belanja Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018

Nama Biro	Anggaran	Realisasi	%
Pemerintahan	Rp . 2.432.644.000,00	Rp 2.380.604.112,00	97,68%
Hukum	Rp. 2.125.812.000,00	Rp. 2.020.226.879,00	95,04%
Humas dan Protokol	Rp. 19.095.797.000,00	Rp 18.753.784.602,00	98,21%
Pembangunan dan Kerjasama	Rp. 2.193.948.000,00	Rp. 2.143.409.470,00	97,70%
Perekonomian dan SDA	Rp. 2.016.492.000,00	Rp 1.995.606.643,00	98,97%
KESRAMAS	Rp. 7.980.428.500,00	Rp. 7.147.790.022,00	89,57%
Organisasi	Rp 2.318.072.100,00	Rp 2.313.120.907,00	99,79%
Umum	Rp. 29.684.263.000,00	Rp. 27.376.585.888,00	92,23%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 4.497.578.529,00	Rp 4.293.439.320,00	95,47%
Total	Rp. 72.345.035.129,00	Rp. 68.424.668.843,00	94,59%

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Setda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 8.969.094.900,00 atau 88,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 10.164.282.371,00 yang terdiri dari Belanja Modal Biro Organisasi dan Biro Umum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Belanja Modal Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018

Nama Biro	Anggaran	Realisasi	(%)
Humas	Rp. 50.000.000,00	Rp. 38.750.000,00	77,50 %
Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp. 10.114.282.371,00	Rp. 8.930.344.900,00	88,29 %
Total	Rp. 10.164.282.371,00	Rp 8.969.094.900,00	88,24 %

5.2. Rincian dan Penjelasan Atas Pos Neraca

5.2.1. Penjelasan Umum

Ringkasan komposisi neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8. Ringkasan Neraca Setda Provinsi Jambi per 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% naik (turun)
Aset	Rp. 825.727.431.181,84	Rp. 1.658.328.540.792,02	49,76 %
Kewajiban	Rp. 137.455.873.052,00	Rp 128.082.771.131,00	94,00 %
Ekuitas	Rp. 688.271.558.129,84	Rp. 1.530.245.769.661,02	222,34 %

Jumlah Nilai Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 780.139.307.540,90,- terdiri dari:

1. Aset Lancar	Rp.	1.264.012.504,00
2. Investasi Jangka Panjang	Rp.	12.197.067.305,64
3. Aset Tetap	Rp.	805.616.269.544,08
4. Aset Lainnya	Rp.	6.650.081.828,12

Jumlah nilai Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 137.455.873,052,00

merupakan Kewajiban Jangka Pendek, yang terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek Utang Belanja Jasa Kantor (Listrik, air dan telepon) sebesar Rp. 320.962.657,00
2. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp.137.134.910.395,00

Jumlah nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 688.271.558.129,84

5.2.2. Penjelasan Per Pos Neraca

5.2.2.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.264.012.504,00 terdiri dari :

1. Kas	Rp.	670,00
2. Piutang lain-lain	Rp.	1.295.699.704,00
3. Penyisihan Piutang	Rp.	(1.276.465.704,00)
4. Biaya Dibayar Dimuka	Rp.	714.554.334,00
5. Persediaan	Rp.	530.223.500,00

5.2.2.1.1. Piutang Lain-lain

Saldo Piutang lain-lain per 31 Desember 2018 adalah Rp.1.295.699.704,00 saldo piutang pendapatan ini terdapat pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar Rp. 397.811.204,00 merupakan piutang PD Angso Duo Putih yang sudah ditutup sesuai dengan perda nomor 6 Tahun 2004 yang menjadi piutang Pemerintah Provinsi Jambi.

Tabel 5.9. Rincian Piutang PD. Angso Putih Per 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Suhaimi (KUD Semangat 45 Bangko)	Rp. 58.760.255,00,-	Rp. 58.760.255,00,-
2	Junaidi Naingholan	Rp.126.805.205,00,-	Rp.126.805.205,00,-
3	AR.Siregar	Rp.129.165.416,00,-	Rp.129.165.416,00,-
4	Istiono/Bambang Sriono	Rp. 83.080.328,00,-	Rp. 83.080.328,00,-

	Jumlah	Rp.397.811.204,00,-	Rp.397.811.204,00,-
--	---------------	----------------------------	----------------------------

5.2.2.1.2. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan Per 31 Desember 2018 nilainya sebesar Rp.897.888.500,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdapat pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5.2.2.1.3. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2018 nilainya sebesar Rp.(1.276.465.704,00) merupakan dana yang disisihkan dari Piutang lain-lain sebesar Rp.(397.811.204,00) dan untuk Piutang Pendapatan sebesar Rp.(897.888.500,00)

5.2.2.1.4. Biaya Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2018 nilainya yaitu Rp.714.554.334,00 nilai tersebut merupakan biaya Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan lain serta Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan yang terdapat pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.10. Rincian Biaya Dibayar Dimuka Setda Prov. Jambi Per 31 Desember 2018

No.	Uraian	Nilai	Masa Berlaku
1.	Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Lain		
	Premi Gedung Kantor	Rp. 37.113.000,00	21 april 2018 – 21 april 2019
	Premi Ruman Dinas	Rp. 71.382.000,00	24 Nop 2018 – 24 Nop 2019
2.	Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan		
	Premi Kendaraan Dinas dan Jabatan	Rp. 198.403.389,00	21 April 2018 – 21 April 2019
	Premi Kendaraan Dinas dan Jabatan	Rp. 122.138,000,00	19 Mei 2018 – 18 Mei 2019
	Premi Kendaraan Dinas dan Jabatan	Rp. 195.998.495,00	15 Sept 2018 – 15 Sept 2019
	Premi Kendaraan Dinas dan Jabatan	Rp. 89.519.450,00	7 Okt 2018 – 7 Okt 2019
	Total	Rp. 714.554.334,00	

5.2.2.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 530.223.500,00 persediaan ini merupakan barang pakai habis kantor dengan rincian jumlah

persediaan masing-masing biro sebagai berikut:

**Tabel 5.11. Rincian Persediaan Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2018**

Nama Biro	31 Desember 2018
Pemerintahan	Rp. 925.400,00
Kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 0,00
Perekonomian dan SDA	Rp. 0,00
Pembangunan dan kerjasama	Rp. 0,00
Umum	Rp. 18.394.200,00
Humas dan Protokol	Rp. 507.772.800,00
Pengelolaan barang Milik Daerah	Rp. 1.824.000,00
Hukum	Rp. 548.500,00
Organisasi	Rp. 158.600,00
Total	Rp. 530.223.500,00

5.2.2.2. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 Rp. 12.197.067.305,64 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.12. Investasi Jangka Panjang Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2018**

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Investasi Non Permanen	Rp. 17.348.983.569,62	Rp. 17.297.176.950,39
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	Rp. (5.151.916.263,98)	Rp. (5.274.825.643,94)
Total	Rp. 12.197.067.305,64	Rp. 12.022.351.306,46

5.2.2.2.1. Investasi Non Permanen

Saldo investasi Non Permanen Dana Kupem Chaneling per 31 Desember 2018 sebesar Rp.17.248.983.568,62 nilainya turun dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 17.297.176.950,39 dan Penyisihan Piutang Pola Chaneling yang diragukan tertagih mengalami kenaikan, untuk tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp. 5.151.916.263,98 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 5.274.825.643,94 adapun rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.13. Rincian Saldo KUPEM
Per 31 Desember 2018**

No	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
-----------	---------------	-----------------------------	-----------------------------

1	Kupem Pola Chaneling Tunggak	Rp. 3.830.085.821,76	Rp. 3.953.501.079,67,-
2	Saldo RekKupem yang berada dikabupaten/kota	Rp. 10.132.077.696,92	Rp. 9.957.468.819,69,-
3	Saldo Giro Beku	Rp.2.064.989.608,72	Rp.2.064.882.486,76,-
4	Tunggakan Kupem Executing	Rp. 1.246.638.881,31	Rp. 1.247.246.003,27,-
5	Tunggakan Kupem Executing (pensertifikatan tanah)	Rp. 75.191.561,00	Rp. 74.078.561,00,-
	Jumlah	Rp.17.348.983.569,62	Rp.17.297.176.950,39,-
1	Penyisihan Piutang Pola Chaneling tak tertagih	Rp.(3.830.085.821,67)	Rp.(3.953.501.079,67),-
2	Penyisihan Piutang Executing tak tertagih	Rp.(1.246.638.881,31)	Rp.(1.247.246.003,27),-
3	Penyisihan Kupem Pensertifikatan Tanah tak tertagih	Rp. (75.191.561,00)	Rp. (74.078.561,00),-
	Jumlah penyisihan KUPEM tidak tertagih	Rp.(5.151.916.263,98)	Rp.(5.274.825.643,94),-
	Jumlah Nilai bersih setelah penyisihan	Rp. 12.197.067.305,64	Rp. 12.022.351.306,45,-

KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industry kecil dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil. Terdapat 2 pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola *Executing* (2011 s.d 2004) dan pola *Channeling* yang dilaksanakan sejak 2005. Pola *Executing* semua tanggung jawab pada Bank Jambi, sedangkan pola *Channeling* tanggung jawab ada pada Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola *Channeling* dan *Executing* tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi. Saldo Dana KUPEM per 31 Desember 2018 sebesar Rp.12.197.067.305,64 dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pola *Channeling*, nilai bersih disajikan setelah penyisihan KUPEM pola *channeling* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14. Penyisihan KUPEM Pola *Channeling*

No	Uraian	Jumlah
1.	Tunggakan kupem channelling Modal kerja per 31 Desember 2018	Rp. 3.830.085.821,67
2.	Akumulasi penyisihan per 31 Desember 2018	Rp.(3.830.085.821,67)
Jumlah nilai bersih disajikan		Rp. 0,00,-

Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.830.085.821,67 jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 3.953.501.079,67. Saldo sebesar Rp.0,00 sudah dilakukan perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 1**).

Tabel 5.15. Rekapitulasi Penyisihan Piutang KUPEM

No.	Kabupaten/Kota	Saldo Tunggakan 2018	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2018	Jumlah (NRV)
1.	Kota Jambi	162.951.674,00	174.351.674,00,-	-
2.	Kabupaten Batang Hari	262.509.323,00	262.509.323,00,-	-
3.	Kabupaten Muaro Jambi	445.776.130,67	456.726.130,67,-	-
4.	Kabupaten Kerinci	303.844.736,00	335.715.737,00,-	-
5.	Kabupaten Merangin	443.239.666,00	483.378.336,00,-	-
6.	Kabupaten Sarolangun	541.678.605,00	556.628.605,00,-	-
7.	Kabupaten Bungo	291.450.467,00	301.450.467,00,-	-
8.	Kabupaten Tebo	236.544.831,00	232.627.081,00,-	-
9.	Kabupaten Tanjung Barat	257.034.955,00	262.684.955,00,-	-
10.	Kabupaten Tanjung Timur	885.055.434,00	887.428.771,00,-	-
Jumlah		3.830.085.821,67	3.953.501.079,67,-	-

2) Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota sebesar Rp. 10.132.077.696,92

Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 10.132.077.696,92 naik sebesar Rp.174.608.877,23 dibandingkan dengan saldo tahun 2017 sebesar Rp.9.957.468.819,69 Saldo sebesar Rp.10.132.077.696,92 tersebut terdapat pada Bank Jambi di kabupaten dan kota (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2**)

- 3) Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.064.989.608,72 naik sebesar Rp.107.121.96 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. .2.064.882.486,76,- Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku sebesar Rp. 2.064.989.608,72 merupakan saldo rekening kupem di Rekening Giro Beku pada Bank Jambi rekening nomor 0101010546.
- 4) Saldo Dana KUPEM *Executting* per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00,-, sama dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.0,00,- Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut.

5.2.2.3. Aset Tetap

Nilai Aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.805.616.269.544.08 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.1.640.334.135.007,80. Nilai Aset tetap berdasarkan data dari pengurus barang yang terdapat pada masing-masing biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.17. Rincian Aset Tetap Setda Provinsi Jambi Per 31 Desember 2018

Uraian	30 Desember 2018	31 Desember 2017
Tanah	Rp. 700.327.346.658,47	Rp. 673.478.013.558,47,-
Peralatan dan Mesin	Rp. 115.597.591.776,12	Rp. 203.018.635.476,49,-
Gedung dan Bangunan	Rp. 102.966.303.371,17	Rp. 532.037.826.951,51,-
Jalan jaringan dan Instalasi	Rp. 3.044.112.498.40	Rp. 364.491.291.889,68,-
Aset tetap lainnya	Rp. 15.963.463.383,24	Rp. 28.804.840.726,81,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,00	Rp. 1.261.778.932,00,-
Akumulasi Penyusutan	Rp. (132.282.548.143,32)	Rp. (162.758.252.527,16)
Total	Rp. 805.616.269.544,08	Rp.1.640.334.135.007,80

5.2.2.3.1. Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.700.327.346.658,47 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 673.478.013.558,47.

Yang terdapat pada Biro Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi.

5.2.2.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.115.597.591.776,12 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.203.018.635.476,49 dengan jumlah rincian pada masing-masing biro sebagai berikut :

Tabel 5.18. Rincian Peralatan dan Mesin Setda Prov Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. 1.087.895.429,25	Rp. 1.037.357.429,25
Hukum	Rp. 1.001.533.430,00	Rp. 935.530.430,00
Humas dan Protokol	Rp. 5.904.302.819,00	Rp. 5.529.926.819,00
Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	Rp. 1.052.136.164,74	Rp. 940.923.164,74
Perekonomian dan SDA	Rp. 1.111.380.235,00	Rp. 1.045.041.735,00
KESRAMAS	Rp. 3.245.727.862,00	Rp. 3.192.379.862,50,-
Organisasi	Rp. 1.125.293.485,00	Rp. 1.109.564.485,00,-
Umum	Rp. 86.448.847.932,01	Rp. 80.105.840.060,33,-
Pengelolaan barang Milik Daerah	Rp. 14.620.470.418,62	Rp. 109.122.071.490,67,-
Total	Rp.. 115.597.591.776,12	Rp.. 203.018.635.476,49,-

5.2.2.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.102.966.303.371,17 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.532.037.826.951,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19. Rincian Gedung dan Bangunan Setda Prov Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Umum	Rp. 56.652.116.103,17	Rp. 40.186.038.483,64,-
Pengelolaan barang Milik Daerah	Rp. 46.314.187.268,00	Rp. 491.851.788.467,87
Total	Rp.. 102.966.303.371,17	Rp. 532.037.826.951,51

5.2.2.3.4. Jalan Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.3.044.112.498,40 sedangkan Saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.364.491.291.889,68 hal ini berarti tidak ada mutasi dan belanja modal pada jalan jaringan dan instalasi sampai dengan per 31 Desember 2017. Rincian belanja modal dan mutasi aset jalan jaringan dan instalasi pada masing-masing biro sebagai berikut:

Tabel 5.20. Jalan Jaringan dan Instalasi Setda Provinsi Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Humas dan Protokol	Rp. 9.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
Umum	Rp. 2.966.316.698,40	Rp. 2.643.435.000,00
Pengelolaan Barang	Rp. 68.795.800,00	Rp.361.841.856.889,68

Milik Daerah		
Total	Rp. 3.004.112.498,40	Rp.364.491.291.889,68

5.2.2.3.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.15.963.463.383,24 sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.28.804.840.726,81 dengan jumlah rincian pada masing-masing biro sebagai berikut:

Tabel 5.21. Aset Tetap Lainnya Setda Prov. Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Hukum	Rp. 51.110.000,00	Rp. 51.110.000,00
KESRAMAS	Rp. 787.993.000,00	Rp. 787.993.000,00
Organisasi	Rp. 174.245.714,00	Rp. 174.245.714,00
Umum	Rp. 1.070.926.863,24	Rp. 1.070.926.863,24
Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp. 13.879.187.806,00	Rp. 26.720.565.149,57
Total	Rp. 15.963.463.383,24	Rp. 28.804.840.726,81

5.2.2.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.1.261.778.932,00

5.2.2.4. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.6.650.081.828,12 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.433.227.922,77 yang terdiri dari aset tidak berwujud (dalam bentuk software), Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan aset lain lain-lainnya seperti Alat rusak berat dan pengembalian belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.22. Aset Lainnya Setda Prov. Jambi Per 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Tagihan Jangka Panjang	Rp. 29.900.000,00	Rp. 45.050.000,00
Aset Tidak Berwujud	Rp. 457.973.680,46	Rp. 290.023.680,46
Aset Lain-lain	Rp. 13.894.428.666,15	Rp. 13.659.474.348,07
Akumulasi Amortisasi	Rp. (302.241.597,14)	Rp. (278.599.520,47)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain	Rp.(7.429.978.921,35)	Rp. (8.282.720.585,29)

Total	Rp. 6.656.051.828,12	Rp. 5.433.227.922,77
--------------	-----------------------------	-----------------------------

5.2.2.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2018 yaitu Rp.29.900.000,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.45.050.000,00 Nilai ini merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebuah kamera video merk sony yang telah hilang dan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 85/KEP.GUB/BPKAD/2016 tanggal 9 Februari 2017 telah dilakukan pembebanan kepada pemakai yang bernama Said Usman (Staf Pelaksana pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi) dengan nilai pembebanan ganti rugi sebesar Rp.2.400.000,00. Nilai pembebanan tersebut telah dilakukan pelunasan dengan 3 (tiga) kali proses angsuran yaitu pada:

1. Tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00,-
2. Tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00,-
3. Tanggal 23 September 2016 sebesar Rp. 400.000,00,-

Sedangkan nilai tagihan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah belum dapat dikeluarkan dari neraca Setda Provinsi Jambi karena belum terbitnya SK penghapusan terhadap barang yang telah dilunasi tersebut.

5.2.2.4.2. Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 yaitu Rp.457.973.680,46 dengan jumlah masing-masing biro sebagai berikut:

**Tabel 5.23. Aset Tidak Berwujud Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2018**

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Hukum	Rp. 129.480.000,00	Rp. 129.480.000,00
Administrasi dan Pembangunan Kerjasama Umum	Rp. 57.120.800,00	Rp. 57.120.800,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 179.007.880,46	Rp. 65.982.880,46
	Rp. 92.365.000,00	Rp. 37.440.000,00
Total	Rp. 457.973.680,46	Rp. 290.023.680,46

5.2.2.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.13.894.428.666,15 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.13.659.474.348,07 terdiri dari jumlah asset lain-lain lainnya, Aset lain-lain dari piutang kekurangan volume belanja dan asset rusak berat dengan rincian sebagai

berikut:

1. Piutang Kekurangan Volume Belanja

Pada tanggal 16 Desember 2014 terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK senilai Rp. 30.623.325,00,- kepada CV. Naofal Agung Laksana atas pengembalian belanja di Biro Umum Setda Provinsi Jambi dan Piutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 21 Januari 2017.

2. Aset Rusak Berat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 550/KEP-GUB/BPKAD/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jambi pada BAPPEDA Provinsi Jambi dan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sejumlah barang rusak berat yang terdapat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah dihapuskan dengan perincian sebagai berikut :

1. Biro Hukum Rp. 76.487.532,00,-
2. Biro Organisasi Rp.106.354.238,00,-
3. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rp.410.555.875,00,-

Sehingga nilai akhir Aset lain-lain per 31 Desember 2018 pada masing-masing biro sebagai berikut :

**Tabel 5.24. Aset Lain-lain Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2018**

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. 280.571.515,75	Rp. 280.571.515,75
Hukum	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Humas dan Protokol	Rp. 222.212.550,00	Rp. 222.212.550,00
Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Perekonomian dan SDA	Rp. 11.712.500,00	Rp. 11.712.500,00
KESRAMAS	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Organisasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Umum	Rp. 10.884.858.127,38	Rp. 11.882.083.291,32
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.495.073.973,02	Rp. 1.278.044.491,00
Total	Rp. 13.894.428.666,15	Rp. 13.659.474.348,07

5.2.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp.137.455.873.052,00 yang terdiri dari Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Rp.128.082.771.131,00 dan Utang Belanja Jasa Kantor senilai Rp.320.962.657,00 yang merupakan Utang Belanja Jasa Kantor pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi

dengan rincian Utang sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Utang Belanja Jasa Telepon | Rp. 52.676.977,00 |
| 2. Utang Belanja Jasa Listrik | Rp. 211.376.040,00 |
| 3. Utang Belanja Jasa Air | Rp. 56.909.640,00 |

5.2.2.6. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00,- sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00,-

5.2.2.7. Ekuitas

Nilai Ekuitas Setda Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.688.271.558.129,84,- terdiri dari :

Tabel 5.25. Rincian Ekuitas Setda Provinsi Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. (2.103.463.996,25)	Rp. (2.329.695.912,25)
Hukum	Rp. (1.975.216.179,00)	Rp. (2.493.641.470,33)
Humas dan Protokol	Rp. (17.595.230.518,67)	Rp. (16.857.071.350,76)
Pembangunan dan Kerjasama	Rp. (2.237.886.810,00)	Rp. (2.413.952.791,00)
Perekonomian dan SDA	Rp. 10.218.836.645,97	Rp. 10.188.536.446,78
KESRAMAS	Rp. (8.210.390.817,33)	Rp. (8.792.444.557,00)
Organisasi	Rp. (2.149.681.909,66)	Rp. (2.656.928.169,66)
Umum	Rp. (31.974.384.008,75)	Rp. (36.947.421.814,78)
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 744.295.688.349,53)	Rp.1.592.548.389.279,93
Total	Rp.688.268.270.755,84	Rp.1.530.245.769.661,02

5.3. Rincian dan Penjelasan Atas Pos Laporan Operasional

5.3.1. Penjelasan Umum

Ringkasan komposisi Laporan Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.26. Komposisi Laporan Operasional Setda Prov. Jambi Per 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan	Rp. 1.308.120.000,00	Rp. 1.001.996.500,00
Beban Operasi	Rp. 135.151.093.429,18	Rp. 157.208.155.199,82
Surplus/Defisit-LO	Rp. (133.842.973.429,18)	Rp. (156.206.158.699,82)

5.3.2 Penjelasan per Pos Laporan Operasional

5.3.2.1. Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.308.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp.	1.308.120.000,00
- Pendapatan Transfer-LO	Rp.	0,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	0,00
- Surplus Non Operasional-LO	Rp.	0,00
- Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00

5.3.2.2 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 135.151.093.429,18 yang terdiri dari :

- Beban Pegawai – LO	Rp.	53.888.053.820,00
- Beban Barang dan Jasa	Rp.	75.098.180.440,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	6.210.973.669,18
- Beban Penyisihan Piutang	Rp.	(46.114.500,00)

5.3.2.2.1 Beban Pegawai - LO

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2018 adalah Rp.53.888.053.820,00 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.46.587.695.029,00 dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut :

Tabel 5.27. Rincian Beban Pegawai Setda Provinsi Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Hukum	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Humas dan Protokol	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Administrasi dan Pembangunan Kerjasama	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Perekonomian dan SDA	Rp. 0,00	Rp. 0,00
KESRAMAS	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Organisasi Umum	Rp. 53.888.053.820,00	Rp. 46.587.695.029,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Total	Rp. 53.888.053.820,00	Rp. 46.587.695.029,00

5.3.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 adalah Rp.75.098.180.440,00 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.75.779.967.601,42 dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut:

Tabel 5.28. Rincian Beban Barang dan Jasa Setda Prov. Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. 2.443.464.712,00	Rp. 2.643.436.428,00
Hukum	Rp. 2.130.064.879,00	Rp. 2.640.421.137,00
Humas dan Protokol	Rp. 18.353.759.802,00	Rp. 17.352.718.184,00
Administrasi dan Pembangunan Kerjasama	Rp. 349.461.470,00	Rp. 2.471.760.851,00
Perekonomian dan SDA	Rp. 2.072.808.643,00	Rp. 1.900.411.693,00
KESRAMAS	Rp. 9.067.075.234,00	Rp. 9.667.773.057,00
Organisasi Umum	Rp. 2.396.570.307,00	Rp. 2.952.721.617,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 31.483.208.523,00	Rp. 31.483.208.523,00
Total	Rp. 75.098.180.440,00	Rp. 75.779.967.601,42

5.3.2.2.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 adalah Rp.6.210.973.669,18 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.33.915.723.569,40 Beban penyusutan dan Amortisasi merupakan penyusutan Aset tetap dan Aset Lainnya dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut :

Tabel 5.29. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Setda Prov. Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. 23.656.800,00	Rp. 30.793.500,00
Hukum	Rp. 50.344.966,67	Rp. 61.425.933,33
Humas dan Protokol	Rp. 0,00	Rp. (88.896.807,33)

Administrasi dan Kerjasama	Rp. 57.446.400,00	Rp. 59.332.260,00
Perekonomian dan SDA	Rp. 38.357.350,00	Rp. 41.095.200,00
KESRAMAS	Rp. 72.343.633,33	Rp. 91.389.900,00
Organisasi Umum	Rp. 63.511.050,00	Rp. 115.135.900,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 5.905.313.469,18	Rp. 7.487.132.755,89
	Rp. 0,00	Rp. 26.118.314.927,51
Total	Rp. 6.210.973.669,18	Rp. 33.915.723.569,40

5.4. Rincian dan Penjelasan Atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Penjelasan Umum

Ringkasan komposisi Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.30. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Setda Prov. Jambi Per 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ekuitas Awal	Rp. 1.657.970.658,02	Rp. 0,00,-
Surplus/Defisit –LO	Rp. (133.842.973.429,18)	Rp.(156.206.158.699,82)
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 133.842.973.429,18	Rp. 127.724.888.759,00
Ekuitas Akhir	Rp. 825.406.468.524,84	Rp. (28.481.269.940,82)

5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.2.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2018 adalah Rp.1.657.970.658.420,02 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00,- dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut :

Tabel 5.31. Rincian Ekuitas Awal Setda Provinsi Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. (2.239.695.912,25)	Rp. 0,00
Hukum	Rp. 146.690.666,67	Rp. 0,00
Humas dan Protokol	Rp. (16.857.071.350,67)	Rp. 0,00
Administrasi dan Kerjasama	Rp. 57.808.060,00	Rp. 0,00

Perekonomian dan SDA	Rp. 12.088.948.139,78	Rp. 0,00
KESRAMAS	Rp. 875.680.050,00	Rp. 0,00
Organisasi	Rp. 301.386.747,34	Rp. 0,00
Umum	Rp. 42.400.810.215,22	Rp. 0,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.1.601.253.417.691,93	Rp. 0,00
Total	Rp. 1.637.937.974.308,02	Rp. 0,00,-

5.4.2.2. Surplus/Defisit - LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2018 adalah Rp.(133.842.973.429,18) merupakan Defisit-LO dikarenakan di pada Sekretariat Provinsi Jambi tidak adanya penerimaan Pendapatan hanya terdapat Belanja, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.(156.206.158.699,82) dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut :

Tabel 5.32. Rincian Surplus/Defisit Setda Provinsi Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. (2.467.111.512,00)	Rp. (2.674.229.928,00)
Hukum	Rp. (2.187.909.845,67)	Rp. (2.701.847.070,33)
Humas dan Protokol	Rp. (18.861.532.622,00)	Rp. (17.263.821.376,67)
Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	Rp. (2.406.907.870,00)	Rp. (2.531.093.111,00)
Perekonomian dan SDA	Rp. (2.071.165.993,00)	Rp. (1.941.506.893,00)
KESRAMAS	Rp. (9.339.418.867,33)	Rp. (9.759.162.957,00)
Organisasi	Rp. (3.460.081.357,00)	Rp. (3.067.857.517,00)
Umum	Rp. (91.276.575.812,18)	Rp. (86.466.389.057,31)
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. (3.439.295.370,00)	Rp. (29.800.250.789,51)
Total	Rp.(133.842.973.429,18)	Rp.(156.206.158.699,82)

5.4.2.2. Kewajiban untuk Di Konsolidasikan

Jumlah Kewajiban untuk Di Konsolidasikan per 31 Desember 2018 adalah Rp.137.134.910.395,00 merupakan koreksi dari adanya Jurnal Penyesuain Ekuitas, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.127.724.888.759,00 dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut :

Tabel 5.33. Rincian Kewajiban untuk Di Konsolidasikan Setda Prov. Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. 5.087.932.540,00	Rp. 2.643.552.428,00
Hukum	Rp. 2.137.599.379,00	Rp. 2.640.332.137,00
Humas dan Protokol	Rp. 36.289.414.306,00	Rp. 17.389.131.684,00
Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	Rp. 2.349.461.470,00	Rp. 2.471.760.851,00
Perekonomian dan SDA	Rp. 2.072.808.643,00	Rp. 1.900.401.693,00
KESRAMAS	Rp. 9.067.075.234,00	Rp. 9.668.124.607,00
Organisasi	Rp. 2.397.328.907,00	Rp. 2.958.314.917,00

Umum	Rp. 85.397.802.308,00	Rp. 79.348.232.030,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 12.368.171.720,00	Rp. 8.705.028.412,00
Total	Rp.137.134.910.395,00	Rp. 127.724.888.759,00

5.4.2.3. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 adalah Rp.825.406.468.524,84 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.(28.481.269.940,82) dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut:

Tabel 5.34. Rincian Ekuitas Akhir Setda Provinsi Jambi Per 31 Desember 2018

Nama Biro	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemerintahan	Rp. 340.916.115,75	Rp. (30.677.500,00)
Hukum	Rp. 162.383.200,00	Rp. (61.514.933,33)
Humas dan Protokol	Rp. 1.305.052.103,33	Rp. 125.310.307,33
Administrasi dan Pembangunan Kerjasama	Rp. 111.574.660,00	Rp. (59.332.260,00)
Perekonomian dan SDA	Rp. 12.291.645.288,97	Rp. (41.095.200,00)
KESRAMAS	Rp. 856.332.866,67	Rp. (91.038.350,00)
Organisasi	Rp. 247.646.997,34	Rp. 109,542.600,00)
Umum	Rp. 53.427.057.223,25	Rp. (7.118.157.027,31)
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 756.663.860.069,53	Rp. (21.095.222.377,51)
Total	Rp. 825.406.468.524,84	Rp. (28.481.269.940,82)

Laporan Keuangan Setda Provinsi Jambi A 2018

BAB VI

PENJELASAN ATAS BELANJA KDH & WKDH.

Realisasi belanja Tidak Langsung KDH dan WKDH per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.369.974.209,00 atau sebesar 53,83% dari belanja yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 2.545.005.368,45 yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6.1. Realisasi Belanja KDH/WKDH Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% NAIK (TURUN)
1.	Gaji dan Tunjangan:	Rp. 325.710.269,00	Rp. 188.291.693,00	57,81%
	- Gaji pokok	Rp. 98.633.700,00	Rp. 75.600.000,00	76,65%
	- PNS/uang Representasi			
	- Tunjangan Keluarga	Rp. 1.808.718,00	Rp. 9.240.000,00	66,91%
	- Tunjangan Jabatan	Rp. 77.538.461,00	Rp. 92.880.000,00	52,32%
	- Tunjangan Beras	Rp. 11.243.656,00	Rp. 5.214.240,00	46,37%
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. 19.106.297,00	Rp. 2.416.733,00	12,65%
	- Pembulatan Gaji	Rp. 10.489,00	Rp. 960,00	9,15%
	- Iuran Asuransi Kesehatan	Rp. 4.241.448,00	Rp. 2.181.600,00	51,44%
	- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 512.500,00	Rp. 155.520,00	30,35%
	- Belanja Jaminan Kematian	Rp. 615.000,00	Rp. 602.640,00	97,99%
2.	Belanja penerimaan lainnya pimpinan & anggota DPRD serta KDH WKDH	Rp. 2.219.295.099,45	Rp 1.181.682.516,00	53,25%
	- Biaya penunjang operasional KDH/WKDH	Rp. 2.219.295.099,45	Rp.1.181.682.516,00	53,25%
	TOTAL	Rp. 2.545.005.368,45	Rp. 1.369.974.209,00	53,83%

BAB VII
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi beralamat di Jalan A. Yani No. 1 Telanaipura Jambi. Sekretariat Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2011 perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Tiga Asisten yang membawahi 8 Biro.

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi pada lingkup Sekretariat yang pada awalnya 9 Biro menjadi 8 Biro yakni Biro Keuangan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2014 berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) serta timbulnya dan Nomenkletur baru yaitu Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan pada tahun 2018 menjadi 9 Biro yakni Biro Keuangan Pengelolaan Asset Daerah pada tahun 2018 berubah menjadi Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) maka akan terjadi perubahan/penyesuaian pencatatan nilai Asset pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk pencatatan Asset tahun 2017 dan semester II tahun 2018 telah dilakukan nilai pencatatan kedalam neraca setda dengan nilai penyusutan sesuai dengan masa manfaat untuk dimasukkan kedalam neraca sebagai acuan laporan keuangan dengan Basis AkruaI.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah ini kami sajikan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunannya berpedoman dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

Laporan keuangan ini memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018, dan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.350.799.500,00 atau 101,56% dari yang ditetapkan sebesar Rp.1.330.000.000,00.

2. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 138.485.709.225,00 atau 92,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 150.188.931.531,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal

3. Neraca

Nilai Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp.825.727.431.181,84 Nilai ini telah dilakukan penyusutan sesuai dengan masa manfaat.

4. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 137.455.873.052,00 merupakan

kewajiban jangka pendek.

5. Ekuitas

Nilai ekuitas per 31 Desember 2018 Sebesar Rp.688.271.558.129,84 merupakan nilai selisih antara aset dan kewajiban.

Demikian Laporan Keuangan ini disajikan untuk memudahkan memberikan gambaran secara transparan dan akuntabel yang dapat memberikan informasi bagi pengguna.

Jambi, 31 Desember 2018

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. M. DIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NP: 19610110 198503 1 005

Laporan Keuangan Setda Provinsi Jambi T.A 2018